

MENYAMBUT HUT PMJ KE-57:

Tuntutan Ideal Dihadapkan Kesadaran Hukum Rendah

Apa yang sudah dilakukan jajaran Polda Metro Jaya dan Sekitarnya (PMJ) selama 57 tahun ini, dapat dipahami tidak seluruhnya dimengerti masyarakat. Antara lain karena masalah komunikasi. Untuk membangun *image* positif, memang tidak bisa dilakukan secara parsial. Maksudnya, kurang bijak dan sangat berlebihan bila kondisi polisi yang belum sepenuhnya ideal, dituntut kinerjanya ideal. Sehingga dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 ini, tentu masih ada harapan masyarakat yang belum bisa dipenuhi PMJ.

POLDA Metro Jaya memang diposisikan sebagai Polda khusus. Mengapa? Karena Polda Metro Jaya berada di Ibu kota negara, yang merupakan tempat interaksi masyarakat nasional dan internasional. Di Jakarta pula terdapat perwakilan diplomatik negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Kompleksitas dan intensitas permasalahan yang muncul dari interaksi masyarakat lokal dan internasional, memunculkan berbagai problematika sosial di dalam masyarakat. Diantaranya dalam bentuk tindak kriminal, baik sekala lokal, nasional maupun transnasional. "Itu memang nyata terjadi dan sedang ditangani oleh jajaran Polda Metro Jaya (PMJ). Sehingga konsep penyelenggaraan operasional PMJ benar-benar berwawasan dunia," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Drs. Ketut Untung Yoga.

Oleh karenanya, kata Ketut, Polisi yang bekerja di PMJ pun tentu harus juga mengenal standar-standar internasional dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Dan di PMJ-lah terjadi peluang besar bagi Polri dan polisi negara lain untuk bekerja sama dalam menuntaskan permasalahan transnasional. Seperti pengungkapan kasus *women trafficking*, kejahatan eksploitasi terhadap (anak) manusia, narkoba, *illegal trading*, *money laundering*, dan sebagainya.

Munculnya kasus-kasus yang sifatnya lokal-nasional di Jakarta, menurut Ketut, perlu diupayakan solusi penanganan paling tepat. Pola-pola pengamanan sudah disusun oleh tim yang dibentuk Kapolda. Pola khusus itu sebagian sudah diterapkan dalam pelaksanaan pengamanan di lapangan. Namun mengingat PMJ menjadi pelaksana fungsi Mabes Polri di bidang pengamanan obyek vital ibu kota, maka pola itu terus

digodog dan disempurkan lebih lanjut. Ke depan, pola itu akan dituangkan tertulis secara detail, sektor demi sektor dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak guna keterpaduan di lapangan.

SKALA PRIORITAS

Kapolri memang menekankan enam sasaran prioritas, khususnya dalam penegakan hukum. Namun untuk PMJ, tentu melakukan prioritas penanganan masalah yang terjadi di PMJ. Seperti *illegal logging*, Jakarta mungkin hanya menjadi tempat pembuangan. "Maka, antisipasi kita tentu di garis laut dengan mengefektifkan Polair dan KP3. Volumennya pun tentu tidak sebesar yang terjadi di pusat *illegal logging* di Kalimantan atau Sumatera.

Justru yang menonjol, kata ketut, untuk ditangani jajaran PMJ adalah kasus-kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi yang cukup menonjol telah ditangani dengan baik.

Sementara di bidang penanggulangan



penyakit masyarakat seperti judi dan premanisme, tetap jalan terus. Bahkan ini menjadi *concern* Kapolda. Sebab, dampak perjudian dan premanisme secara langsung dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan data, penduduk DKI yang sekitar 12 juta jiwa, 60 persennya adalah kelas menengah ke bawah. Dengan penanganan secara konsisten, diharapkan dapat mengurangi tingkat kekhawatiran dan keresahan masyarakat.

Sementara kasus narkoba, yang menjadi ancaman bagi nasib generasi bangsa, maka polisi bertindak secara proaktif dan terus-menerus. Tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga pencegahan. Sebab, kalau hanya bertindak sebagai penegak hukum, mirip "pemadam kebakaran" saja. "Bila ingin menyelamatkan generasi bangsa, perlu memperbanyak langkah proaktif. Kita harus berbuat sesuatu agar tingkat imunitas masyarakat sangat kuat untuk menolak narkoba. Salah satu contohnya adalah *pilot project* di Jakarta Timur. Di sana masyarakat memperkecil ruang gerak masuknya narkoba di wilayahnya," jelasnya. Pola ini diharapkan segera diikuti daerah dan wilayah lain.

TUNTUTAN IDEAL

Apa yang sudah dilakukan polisi di jajaran PMJ selama 57 tahun ini, tidak seluruhnya dimengerti masyarakat. Untuk membangun image, memang tidak bisa dilakukan secara parsial. Maksudnya, kurang bijak dan sangat berlebihan bila kondisi polisi yang belum sepenuhnya ideal, dituntut kinerjanya ideal.

"Idealisme apapun, hanya mungkin menjadi kenyataan apabila terjadi kebersamaan dan pengorbanan," tandas Ketut. Sekarang saja, menurutnya, dalam HUT PMJ ke-57, mengacu umur manusia tentunya secara biologis sudah dianggap matang. Bila manusia dianggap matang, tentu dia diharapkan dapat melakukan kinerja memuaskan. Kalau memang di PMJ masih nampak belum ideal di sana-sini, bukan berarti insan-insan polisi di PMJ tidak punya komitmen ke arah situ. Intinya, adalah perlu adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari penentu keputusan yaitu pemerintah.

Contoh, apakah sudah memadai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas di lapangan? Padahal masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani, belum tentu mengerti soal itu. Jadi, wajar bila masyarakat menuntut yang ideal. Ini disebabkan, memang banyak yang tidak terinformasikan secara lengkap tentang

kondisi polisi sesungguhnya.

Karena suka tidak suka, mau tidak mau masyarakat tetap berharap yang ideal dari polisi, yang menjadi garda terdepan mengawal pembangunan Ibu Kota yang dinamis, maka hal itu dijadikan motivasi. Keterbatasan fasilitas dan anggaran yang telah berlangsung lama, tidak menyurutkan motivasi bagi polisi. Polisi harus tetap bekerja dengan mengefektifkan sistem yang ada. Di samping juga harus menerima secara terbuka segala bentuk masukan, kritik dan keluhan dari masyarakat.

Saat ini, sebut Ketut, Polda Metro Jaya mengelola sekitar 27.000 personil polisi, didukung 3.000-an PNS. Dengan penduduk DKI Jakarta sekitar 12 juta, maka menurut rasio PBB jumlah polisi tersebut memang belum sesuai yaitu baru 1:750-an. Sementara menurut PPB perbandingan jumlah penduduk dan polisi idealnya adalah 1:400.

"Tapi kita tidak bisa berpatokan hanya kepada itu. Mengapa? Karena memang kondisi sosial masyarakat kita juga belum menggembirakan dalam hal pemahaman, pengertian, kedisiplinan dan ketaatan hukumnya. Contoh, tertib berlalu-lintas di jalan, masih menjadi pekerjaan berat bagi Polda Metro Jaya, di samping juga dipengaruhi oleh soal infrastruktur dan sistem transportasi lalu lintas yang belum ideal. Ditambah perilaku ketaatan di jalan raya yang belum menggembirakan," papar Ketut.

Ada semacam hal tidak menguntungkan di masyarakat, bahwa suatu perbuatan asalkan banyak yang melakukan, dianggap sebagai yang harus diikuti, padahal ini sangat kontradiktif dengan penegakan aturan. Dalam hal ini, maka polisi tidak akan pernah populer. Tidak akan pernah mendapat apresiasi yang wajar.

REWARD AND PUNISHMENT

Secara teoritis, pembinaan personil yang ideal adalah lazimnya menerapkan sistem *reward and punishment*. Di dunia kepolisian Indonesia, soal *punishment* sudah jelas di mata masyarakat. Polisi memiliki tiga koridor soal *punishment*. Yaitu peradilan umum, peradilan disiplin dan peradilan profesi.

Sementara untuk *reward*, memang masih sangat terbatas yang dapat dilakukan oleh institusi Polri sendiri terhadap anggotanya. *Reward* sesungguhnya harus berasal dari pemerintah. Tentang besaran gaji misalnya, harus dilakukan riset mendalam tentang berapa layakannya gaji polisi yang jam kerjanya tak kenal waktu di ibu kota. "Silakan lembaga

independen melakukan riset. Kira-kira apakah mampu pemerintah memenuhinya," tanyanya.

Selama ini, *reward* yang diberikan Polri kepada anggotanya, lebih pada hal-hal yang memberi harapan. Misal, bagi polisi yang berprestasi diberi prioritas kesempatan pendidikan lanjut dan prioritas peluang jabatan. Istilahnya, ada kemudahan selektifitas untuk prioritas mendapatkan peluang jabatan. *Reward* dalam bentuk materi lebih tepat menjadi tanggungjawab pemerintah.

Barangkali karena kesulitan yang dialami anggota Polri, selama kurun waktu setah un ini, masih cukup banyak anggota "bermasalah". Baik di kalangan perwira maupun bintara. Pada tahun 2005 lalu, ada sekitar 76 anggota bermasalah dan 20-an diantaranya harus dipecat. Sementara pada tahun 2006 ini juga sudah ada beberapa anggota yang dipecat.

PENTINGNYA POLMAS

Kini, semua negara di dunia sedang mengembangkan pola pemolisian masyarakat (*Polmas*) atau *community policing*. Negara dengan rasio polisi ideal pun, akan mengembangkan *community policing*. Mengapa? Karena ini soal mendasar. Aktifitas masyarakat akan sangat membantu dalam tugas-tugas kepolisian. Negara dengan rasio polisi 1:200 misalnya, kalau ternyata 200 penduduknya itu cuek, maka tugas-tugas polisi tetap saja berat. Tapi bila 200 penduduk itu kesadaran hukumnya tinggi dan mendukung tugas kepolisian, itulah yang diharapkan.

Bagaimana agar masyarakat dapat aktif membantu tugas-tugas kepolisian?. Di sinilah menurut Ketut perlunya upaya-upaya *community policing*. Yaitu meng-intemalisasikan tugas-tugas kepolisian kepada masyarakat. Karena itu, *community policing* dalam strata negara dan masyarakat seperti apapun, akan tetap menjadi kebutuhan di masa mendatang. Kepedulian dari individual masyarakat membantu tugas-tugas kepolisian, benar-benar sangat besar diharapkan.

"Selain itu, anggota Polri memang harus dekat dengan masyarakat. Sebab, agar dapat melayani dan melindungi, syarat mendasar adalah harus dekat dengan masyarakat, *face to face* dan menyatu. Tidak bisa dari jauh. Dengan komunikasi yang intens, segala hal berkaitan pencegahan dan *problem solving* bidang penanggulangan kriminalitas, dapat dibicarakan bersama," imbuhnya. [rus/bud]